

Kepentingan Muslimat Nahdhatul Ulama Dalam Implementasi Program Dana Intensif Khafidz-Khafidzoh Jombang

Mohamad Aqwamul Kirom¹

Abstrak

Muslimat Nahdhatul Ulama adalah salah satu kelompok kepentingan yang berpartisipasi dalam berjalannya demokrasi Indonesia. Partisipasi politik kelompok ini juga mempunyai pengaruh pada berjalannya lembaga pemerintahan untuk membuat suatu kebijakan. Termasuk program dana intensif khafidz-khafidzoh pada berjalannya Pemerintah Kabupaten Jombang, merupakan salah satu bukti pengaruh kelompok keperempuanan NU, dimana kelompok ini juga mempunyai kader yang duduk distruktur elit birokrasi Jombang. Tentu dalam munculnya sebuah kebijakan dari sebuah kelompok kepentingan terdapat kepentingan-kepentingan yang dimuat di dalamnya. Kelompok yang terdiri dari elit kaum perempuan dengan kegiatan majlis ta'lim, pendidikan agama sekaligus kesehatan ini, sungguh mempunyai kekuatan politik yang cukup besar terutama ketika proses Pilkada. Mulai dari pendekatan yang dibangun melalui peran kelompok inilah salah satu semangat utama Muslimat untuk menggerakkan anggotanya untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik guna mengakomodir kepentingan kelompoknya. Munculnya sebuah program dana intensif, pasca berhasilnya Muslimat dalam mengusung kadernya menjadi Wakil Bupati pada Pilkada 2013, merupakan sebuah fenomena yang cukup menarik untuk dikupas, sebagai bukti betapa besarnya pengaruh kelompok kepentingan ini dalam pembuatan sekaligus berjalannya program. Ditambah adanya upaya konsolidasi khususnya untuk menyambut Pilkada 2018 melalui program tersebut dengan mengadakan kegiatan-kegiatan di akar rumput pedesaan dan beberapa wilayah di Kabupaten Jombang.

Kata Kunci : Kelompok Kepentingan, Elit, Konsolidasi, dan Pilkada 2018

Abstract

Muslimat Nahdhatul Ulama is one of the interest groups that play a role in the progress of Indonesian democracy. Participation of this group also has an influence on the running of government agencies to make a policy. Including Khafidz-khafidzoh intensive funding program in the run of Jombang Regency Government is one of the evidence of NU women's group's influence, where this group also has cadres who sit in Jombang's bureaucratic elite structure. Of course in the emergence of a policy of a interest group there are interests contained in it. The group consisting of women elites with ta'lim majlis activities, religious education as well as health, really have a considerable political force, especially when the election process. Starting from the approach built through the role of the group is one of the main spirit of Muslimat to mobilize its members to participate in political contestation to accommodate the interests of the group. The emergence of an intensive funding program, after the success of the Muslimat in carrying his cadre to Vice Regent in the 2013 regional election, is a phenomenon that is quite interesting to peel, as evidence of the magnitude of the influence of these interest groups in the making and running of the program. Added to the consolidation efforts especially to welcome the 2018 elections, through the program by holding activities in the rural grass roots and some areas in Jombang regency.

Keywords: Interest Groups, Elite, consolidation, and 2018 Election

¹ Peneliti adalah mahasiswa Program Sarjana Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. m-a-k@fisip.unair.ac.id

Pendahuluan

Pemerintahan dalam negara demokrasi pasti tidak terlepas dari pusaran arus aspirasi kepentingan kelompok di dalamnya. Lembaga pemerintah merupakan sebuah instrument bagi kelompok kepentingan untuk memperjuangkan tujuannya, karena bagaimana pun dengan bisa memberikan pengaruh kepada kebijakan yang dibuat, maka kelompok kepentingan dapat mendapatkan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut sebuah literatur juga dijelaskan bahwa, sistem politik adalah totalitas interaksi antar unit-unit yang ada di dalamnya. Interaksi tersebut tidak hanya sebatas pada lembaga-lembaga atau aktor politik formal saja, melainkan aktor informal². Dan adanya aktor informal inilah sebuah kelompok kepentingan yang berbentuk asosiasi ataupun organisasi masyarakat memberikan sebuah pengaruh, seperti kelompok keperempuanan Muslimat NU dalam berjalannya Pemerintah Kabupaten Jombang .

Organisasi keperempuanan yaitu Muslimat NU. Berdasarkan data yang ada Muslimat NU Jombang terdiri dari 306 Pimpinan Ranting dan 21 PAC (Pimpinan Anak Cabang) atau tingkat kecamatan, besarnya jaringan Muslimat yang berada di beberapa plosok desa Jombang membuat pengaruhnya pun juga cukup kuat, terutama ketika regenerasi pemerintahan (pemilihan umum) atau saat berjalannya pemerintahan. Apalagi pada Pemerintahan Jombang saat ini struktur elit birokrasinya juga terdapat Ketua Muslimat yang berposisi menjadi Wakil Bupati Jombang yaitu Hj Munjidah Wahab. Dengan adanya anggota kelompok kepentingan ini dalam birokrasi tentu semakin memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam menata berjalannya program pemerintah, terutama yang menyangkut kesejahteraan.

Pemerintahan Kabupaten Jombang merupakan salah satu lembaga eksekutif daerah yang ingin memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tentu dengan membuat sebuah program bagi masyarakatnya yang sebelumnya belum ada. Maka pemerintah membuat sebuah program dana intensif khafidz-khafidzoh yang diperuntukan kepada para penghafal Al-Qur'an diseluruh daerah Kabupaten Jombang. Program tersebut dibuat oleh pemerintah dikarenakan pengabdian para khafidz-khafidzoh sebagai penggiat kegiatan ke-agamaan di desa-desa telah menghidupkan identitas Jombang untuk menjadi kota santri. Namun pada awal sebelum dijadikan program dana intensif merupakan hibah dari pemerintah, karena hibah sifatnya tidak diberikan setiap tahun, maka dijadikanlah program pemerintah yang pencairan dananya bisa dilakukan setiap tahun. Ditambah yang menjadi menarik adalah penerima dan pelaksana

² Almond, Gabriel. 1956. *Comparative Political System*. Southern Political Science Association.

kegiatan dari program dana intensif ini mayoritas adalah anggota Muslimat NU di beberapa wilayah kecamatan. Tentu ada tujuan utama yang menjadikan anggota Muslimat ini sebagai pelaksana kegiatan program pemerintah tersebut.

Jumlah penerima tetap dana intensif sebanyak 320 orang yang terdiri dari 306 khafidz-khafidzoh dan 14 koordinator yang telah ditunjuk untuk memantau kegiatan pengabdian, dimana anggaran yang dikeluarkan untuk program tersebut sebesar Rp. 982.000.000 pertahun. Dengan adanya bantuan tersebut kepada penghafal Al-Qur'an yang mayoritas Muslimat, membuat partisipasi organisasi keperempuanan ini dalam kegiatan pemerintah semakin meningkat. Partisipasi yang meningkat tersebut ditunjukkan dengan diadakannya konsolidasi khafidzoh setelah menerima dana intensif yang bertempat di Masjid Pemkab Jombang atau di rumah dinas Wakil Bupati Jombang untuk membahas kegiatan-kegiatan di setiap kecamatan.

Sebuah kegiatan pemerintah yang diinisiatif oleh satu kelompok tentu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok tersebut. Karena bagaimana pun sebuah kegiatan pemerintah merupakan sebuah wadah yang bisa dijadikan panggung bagi sebuah kelompok untuk mendapatkan legitimasi dari lingkungan sosial. Kuatnya ikatan yang diberikan kelompok akan berdampak juga pada sebuah dukungan politik. Seperti hubungan implementasi program dana intensif ini dengan kepentingan Muslimat Jombang, dimana anggota Muslimat yang sekarang berposisi sebagai Wakil Bupati ingin memajukan dirinya menjadi kandidat calon Bupati pada Pilkada 2018 nanti, tentu dengan pencalonannya ini membuat anggota Muslimat tersebut akan bersaing dengan Bupati saat ini yaitu Hj Nyono Suharli.

Tulisan jurnal ini menggunakan teori kelompok kepentingan sebagai pisau analisis untuk mengisi celah dalam kajian kepentingan Muslimat NU dalam implementasi program dana intensif, untuk mengupas dan mengetahui apa dan bagaimana organisasi keperempuanan ini memperjuangkan kepentingannya.

Gabriel Almond : Kelompok Kepentingan

Menurut penjelasan yang dituliskan oleh Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik³. Diantaranya banyaknya kelompok kepentingan yang ada, pasti setiap kelompok mempunyai kepentingannya masing-masing, sehingga pasti terjadi sebuah komunikasi antara kelompok satu dengan yang lain, dan proses

³ Almond, Gabriel “ *Kelompok Kepentingan dan Parta Politik* “ dalam Mochtar Mas’oed dan Colin Mac. Andrews., *Studi Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2001), hal-7581

itu juga ditentukan oleh besarnya pengaruh serta basis masa yang dimiliki. Dengan pola gaya kepemimpinan yang satu arah pada kelompok-kelompok kepentingan yang mengatasnamakan suku, etnis atau pun agama pastilah menggunakan strategi tertentu untuk memelihara basis anggotanya, terutama beberapa hal yang berkaitan dengan finansial dan kesejahteraan.

Sehingga otomatis kelompok kepentingan yang mampu memberikan nilai serta kesejahteraan yang jelas pada basis anggota yang besar, dan terdistribusikan diberbagai struktur pemerintahan, maka kelompok ini pasti mampu memberikan pengaruh pada struktur tersebut. Kelompok kepentingan memiliki bermacam macam gaya, struktur, sumber keuangan dan hal itu sangat memiliki pengaruh terhadap kehidupan politik, ekonomi dan budaya.⁴ Oleh karenanya peranan Muslimat dalam implementasi program dana intensif juga akan berdampak pada pengaruh yang dimilikinya, hal itu tidak lain terjadi adanya legitimasi dari pemerintah melalui program kesejahteraan tersebut untuk mengadakan kegiatan ke-agamaan di pedesaan, sehingga dari pengaruh program tersebut kelompok perempuan ini bisa mewujudkan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingannya.

Terdapat beberapa faktor hal membuat sebuah kelompok-kelompok kepentingan yang efektif, salah satunya yakni dengan kemampuan kelompok kepentingan tersebut untuk memobilisasi dukungan, energi, dan sumber daya dan yang pasti hal tersebut merupakan faktor penting⁵. Jadi ketika sebuah kelompok kepentingan mampu untuk membuat tujuan yang dapat diperjuangkan bersama maka otomatis kelompok tersebut sangat mampu menggerakkan anggotanya dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan kelompoknya.

Kepentingan Muslimat Nahdhatul Ulama Jombang

Sebuah organisasi yang terlibat dalam sebuah kegiatan pemerintah pasti mempunyai sebuah kepentingan untuk diperjuangkan. Begitu pula kepentingan Muslimat Jombang dalam implementasi program dana intensif khafidz-khafidzoh yang telah dibuat oleh pemerintah. Ada banyak kepentingan dalam keterlibatan organisasi ini, diantaranya: kepentingan untuk meningkatkan partisipasi kelompok, kepentingan untuk membesarkan kelompok melalui peningkatan kesejahteraan, dan terakhir kepentingan dalam memajukan anggotanya pada pesta demokrasi Pilkada 2018 di Kabupaten Jombang.

⁴ Almond, Gabriel “*Comparative Politics Today ; A world view*” *Interest and Articulation Interes Groups* hal 70 ¹⁵ Ibid hal 72

⁵ *Ibid*, Gabriel Almond hal 75

Yang pertama untuk semakin meningkatkan partisipasi perempuan Muslimat dalam berjalannya Pemerintah Kabupaten Jombang. Bagaimana pun Muslimat merupakan kelompok kepentingan yang beranggotakan perempuan, ketika kelompok ini mempunyai pengaruh dalam partisipasi berjalannya pemerintah otomatis peran kaum perempuan dalam ranah publik pun ikut meningkat. Meningkatnya partisipasi perempuan Muslimat juga disebabkan karenanya adanya fasilitas pengabdian dari pemerintah. Dan dari situ posisi perempuan diwilayah publik tidak bisa dianggap sebelah mata terutama pada wilayah politik.

Keterlibatan sebuah kelompok kepentingan dalam kegiatan program pemerintah merupakan salah satu indikasi meningkatnya partisipasi politik kelompok tersebut, seperti yang dijelaskan pada sebuah literatur, bahwa pembangunan merupakan sebuah perluasan peran dari pemerintah, sehingga pemerintah yang melakukan sebuah tindakan tersebut, pasti juga akan melibatkan kelompok-kelompok yang ada disekitarnya⁶. Oleh karenanya dengan terlibatnya Muslimat pada implementasi program ini juga berdampak pada meningkatkan partisipasi kelompok yang juga meningkatkan legitimasi kelompok pada lingkungan sosial.

Untuk kepentingan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan anggota Muslimat Jombang. Sebuah kelompok bila kesejahteraan anggotanya meningkat tentu akan berdampak pada berjalannya roda organisasi, seperti partisipasi Muslimat dalam implementasi program dana intensif ini. Pada awalnya program dana intensif ini bukanlah program wajib pemerintah melainkan dana hibah, namun seiring berjalannya pemerintahan. Kegiatan bantuan dana hibah tersebut dijadikan program pemerintah setiap tahun dimana distribusinya melalui pihak KESRA Jombang, hal tersebut dilakukan karena sifat dana hibah atau bansos tidak bisa diberikan setiap tahun. Dan dijelaskan dalam permendagri, bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan⁷.

Sehingga dari situlah program dana intensif dibuat dan disetiap kegiatan pengabdianya disertakan buku laporan ataupun LPJ agar pertanggung jawabannya jelas. Karena bagaimana pun pemerintah yang terdapat aktivitas atau proses politik didalamnya, tidaklah terwujud tanpa sebuah aktivitas kelompok, karena aktivitas kelompok yang terorganisasi dan mempunyai kepentingan akan melahirkan sebuah kekuatan-kekuatan untuk menjalankan roda politik

⁶ Dalam buku, Huntington, Samuel “ *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*”. Jakarta : Rineka Cipta, 1994. Diambil pada hal, 60-61 tentang hubungan pembangunan dan partisipasi

⁷ Dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Pendapatan Daerah.

pemerintah⁸. Sama halnya peran Muslimat dalam Implementasi program dana intensif khafidz-khafidzoh Jombang.

Keterlibatan Muslimat dalam proses implementasi program dana intensif ini tentu tidak hanya sekedar berkaitan dengan partisipasi perempuan dan kesejahteraan. Melainkan juga mempunyai tujuan politik yang dipersiapkan guna menyambut kontestasi Pilkada. Dalam perjalannya program Muslimat juga mempunyai kepentingan untuk melakukan konsolidasi anggotanya, melalui agenda kegiatan ke-agamaan di beberapa wilayah kecamatan guna menyambut Pilkada 2018 di Kabupaten Jombang. Karena dari temuan yang ada kelompok Muslimat Jombang memang siap mendukung anggotanya yaitu Hj Munjidah Wahab sebagai kandidat calon Bupati Jombang pada Pilkada nanti.

Kepentingan Muslimat untuk menjadikan anggotanya sebagai elit politik, karena dengan adanya anggota yang menjadi elit politik maka tujuan kelompok pun akan mudah diwujudkan. Terutama dalam proses kontestasi Pilkada 2018, yang menjadi perjuangan sebuah kelompok dalam menguasai ruang publik untuk memberikan pengaruhnya dalam mencapai kepentingan yang dimiliki kelompok. Jombang yang mayoritas penduduknya kaum santri merupakan basis politik bagi kelompok-kelompok ke-agamaan, begitu pula pada posisi Muslimat yang menjadi kelompok ke-agamaan perempuan. Oleh karenanya dengan keikutsertaannya dalam kontestasi politik akan menjadi menarik mengingat perjuangan yang dilakukan, melalui konsolidasi yang dilakukan lewat kegiatan program pemerintah membuat kelompok ini semakin mendapatkan legitimasi dari masyarakat Jombang.

Upaya Muslimat Dalam Memperjuangkan Kepentinganannya

Dalam sebuah upaya kelompok tentu harus ada salah satu representasi yang menjadi penggerak, sebagai simbol, maupun sebagai penanggung jawab berjalannya arah tujuan organisasi, disinilah peranan elit dalam sebuah kelompok. Dalam sebuah negara demokrasi tentu suara mayoritas kelompok telah diwakili oleh representasinya di legislatif ataupun eksekutif pemerintahan. Muslimat Jombang yang sekarang dipimpin oleh Hj Munjidah Wahab yang juga sebagai Wakil Bupati tentu sangat berpengaruh pada semakin luasnya legitimasi kelompok ditengah-tengah kehidupan Masyarakat.

Hubungan antara elit dan kelompok merupakan ikatan yang tidak bisa dipisahkan, begitu pula posisi Ketua Muslimat Jombang yang menjadi Wakil Bupati. Ditambah Ketua

⁸ Bentley, Arthur F.1908. *The Process of Government, A Study of the Social Pressures*, Chicago, Universty of Chicago Press.

Muslimat saat ini juga siap bertarung pada kontestasi Pilkada 2018 untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Jombang. Tentu tanggung jawab dan tugas yang dimilikinya menjadi bertambah, terutama kepada kelompok yang memberikan legitimasi kepada dirinya. Bagaimana pun seorang elit pun mempunyai beberapa tugas fungsi penting yang harus dilakukan; (1) menata hubungan antara kelompok kecil hingga sasaran kolektif dapat tercapai; (2) untuk menyatukan norma-norma ideal yang menentukan setiap kolektivitas dan ketergantungan hidup; (3) untuk melambangkan solidaritas dilakukan berbagai tata cara daada pertemuan⁹. Dan disinilah posisi Hj Munjidah Wahab yang memberikan peran kepada Muslimat untuk mensukseskan implementasi dana intensif khafidz-khafidzoh Jombang, dengan adanya pemberian peran tersebutlah akhirnya terbentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

Bagaimana pun seorang elit pasti mereka tergantung dengan publik masyarakat begitu juga sebaliknya. Hubungan simbolis elit dengan pengikutnya dapat diamati lebih jelas pada kelompok-kelompok kecil yang mencakup interaksi langsung antara pemimpin dan yang dipimpin¹⁰. Tentu dari interaksi yang dibangun oleh Hj Munjidah dengan kelompok Muslimatnya tidak hanya pada implementasi program dana intensif saja, melainkan interaksi itu dibangun sebelum dan sesudah kegiatan implementasi program. Interaksi yang biasanya dilakukan adalah konsolidasi khafidzoh Muslimat untuk melakukan kegiatan ke-agamaan yang juga selalu dihadiri oleh Hj Munjidah. Sehingga secara langsung adanya kegiatan Muslimat yang melibatkan khafidzoh penerima dana intensif ini bisa menjadi panggung politik bagi Ketua Muslimat yang menjadi Wakil Bupati saat ini untuk persiapan menghadapi Pilkada 2018.

Adanya konsolidasi Muslimat melalui program dana intensif, merupakan sebuah hal yang biasa dilakukan oleh sebuah kelompok kepentingan yang mempunyai akses untuk memberikan pengaruh pada pemerintah. Konsolidasi yang dilakukan dalam implementasi program memang untuk menguatkan interaksi kelompok anggota yang berada di elit birokrasi dengan anggota yang berada di akar rumput masyarakat. Dan dari hasil konsolidasi tersebut terbantuklah Forum Khafidzoh Muslimat Jombang, yang bertanggung jawab menggiatkan kegiatan pemerintah dengan menggandeng masyarakat dalam kegiatan yang diadakan oleh Muslimat di beberapa wilayah Jombang.

⁹ Dalam buku Keller, Suzzan. *Penguasa dan Kelompok Elite : Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1995

¹⁰ *Ibid* hal : 236

Terbentuknya Forum Khafidzoh Muslimat Jombang pada tahun 2015 digagas untuk menata wilayah da'wah. Ditambah ketika kongres Muslimat Pusat ke-17 di Jakarta pada tahun 2016 kemarin, menghasilkan rumusan untuk mengintruksikan setiap Cabang membentuk Ikatan Khafidzoh Muslimat. Dengan tujuan meng-Qur'an kan masyarakat, hasil kongres tersebut mulai dilaksanakan untuk menjaga pengkaderan penghafal Al-Qur'an terutama dari anggota Muslimat. Dengan adanya forum ini Muslimat semakin mudah mengkonsolidasikan anggotanya dalam beberapa agenda kegiatan yang telah dibuat oleh kelompok.

Membuat kegiatan ke-agamaan di desa-desa melalui program dana intensif, merupakan salah satu upaya konsolidasi yang dilakukan Muslimat guna mempersiapkan anggotanya dalam menyambut kontestasi 2018, dari informasi yang diperoleh penulis, bahwa setiap pengurus Anak Cabang Muslimat telah memiliki tim da'wah untuk melakukan sosialisasi politik untuk memberikan dukungan kepada Hj Munjidah Wahab sebagai kandidat calon pada pemilihan Kepala Daerah nanti. Serangkaian kegiatan yang diadakan oleh pengurus Anak Cabang Muslimat sebagai panggung politik tentu tidak main-main, setiap satu bulan sekali Muslimat Anak Cabang di beberapa wilayah, mengadakan pengajian kubro yang dihadiri oleh ribuan anggotanya dari berbagai pelosok desa di kecamatan tersebut. Oleh karenanya dengan upaya Muslimat melakukan konsolidasi anggota seperti ini dipastikan militansi kelompok ini untuk menyambut Pilkada Jombang nanti akan sangat kuat.

Dinamika Politik Yang Dihadapi Muslimat Jombang

Dalam berjalannya kelompok kepentingan dalam memperjuangkan tujuannya tentu tidak terlepas dari dinamika yang dialami. Begitu juga dinamika yang dialami Muslimat saat megawal anggotanya di pemerintahan. Ada banyak dinamika yang dihadapi Muslimat seperti terjadinya mutasi anggota dan simpatisan Muslimat yang dekat dengan Hj Munjidah Wahab ditengah berjalannya pemerintahan. Terjadinya mutasi itu juga dibenarkan oleh Wakil Bupati saat ini, sehingga dari terjadinya mutasi pegawai itu membuat banyak anggota birokrasi pemerintah yang tidak berani mendekati Hj Munjidah dalam beberapa kegiatan pemerintahan.

Terjadinya kontestasi pasti juga berdampak pada konflik yang berujung pada ketidak harmonisan, seperti dijelaskan pada sebuah literatur, bahwa perebutan wilayah kekuasaan atau kewenangan antar kelompok merupakan penyebab lain dari konflik, hal ini kecenderungan

manusia untuk berkuasa menjadi salah satu penyebab konflik¹¹. Dinamika yang terjadi Muslimat juga dirasakan oleh anggota Muslimat yang menerima dana intensif, yang mengalami kesalahan komunikasi dengan pihak panitia saat pembagian intensif saat beberapa bulan lalu, dan itu berdampak pada kekecewaan penerima dana intensif itu. Memang sebuah dinamika konflik tidak bisa dihindarkan dalam sebuah kontestasi. Jadi ketika Muslimat memajukan anggotanya dalam kontestasi Pilkada 2018 dengan melawan Bupati petahana H Nyono Suharli, maka Muslimat harus siap dengan gesekan konflik yang terjadi selama berjalannya pemerintahan.

Dinamika yang akan dihadapi kelompok kepentingan Muslimat tidak akan hanya dialami saat berjalannya pemerintahan saja, melainkan saat Pilkada nanti perjuangan Muslimat untuk mendukung Ketuanya juga akan benar-benar akan diuji. Dari informasi saat ini poros politik Pilkada Jombang akan diikuti 3 pasangan bakal calon. Yaitu Syafiin-Choirul (Syahrul) diusung oleh PDIP-HANURA, pasangan Mundjidah Wahab-Sumrambah yang diusung PPP, Partai Demokrat dan Gerindra mendaftar pada Senin (8/1/2018). Sementara pasangan Nyono Suharli Wihandoko-Subaidi Muchtar yang diusung PKB, Partai Golkar, PKS, PAN dan NasDem yang baru mendaftar ¹². Dengan keadaan peta politik seperti ini akan menjadi dinamika politik yang cukup berat bagi Muslimat.

Hal tersebut terjadi munculnya tiga pasang calon yang mana calon Wakil Bupati yang digandeng oleh Hj Munjidah adalah kader PDIP Jombang juga yang tahun sebelumnya juga mencalonkan diri sebagai kandidat pada Pilkada 2013, dan posisi pada saat ini PDIP Jombang mengusung kandidatnya sendiri dan tidak berkoalisi dengan poros Hj Munjidah. Ditambah pada posisi lain H Nyono Suharli sebagai Bupati petahana berkoalisi dengan PKB untuk mendapatkan suara dari kalangan santri, oleh karenanya dengan dinamika politik ini menjadikan Hj Munjidah bersama koalisi dan Muslimatnya harus berjuang penuh untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Jombang.

Posisi poros politik Jombang saat ini tentu mengharuskan Muslimat semakin menguatkan militansi kelompoknya sebagai kunci kemenangan Hj Munjidah Wahab. Dengan tetap menghidupkan kegiatan yang digerakan oleh Muslimat selama implementasi dana

¹¹ Rauf, Maswadi. *Konsensus dan Konflik Politik*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional .2001

¹²Enggran Eko Budianto, Diusung PDIP-HANURA Perwira Mabes Polri Maju, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d3808946/diusung-pdip-hanura-perwira-mabes-polri-maju-di-pilbup-jombang/> . Diakses pada 10/01/2018 jam 20:00.

intensif khafidz-khafidzoh berupa kegiatan da'wah dan pengajian kubro kemarin, merupakan salah satu faktor yang menguatkan posisi Hj Munjidah Wahab-Sumrambah dimata masyarakat yang mayoritas terdiri dari kalangan santri. Oleh karenanya dengan menghidupkan kegiatan ke-agamaan di desa-desa sebagai militansi perjuangan Muslimat adalah salah sebuah upaya agar keberhasilan Muslimat pada Pilkada 2013 dapat terulang pada Pilkada 2018 nanti.

Kesimpulan

Adanya peranan sebuah kelompok kepentingan dalam implementasi sebuah program pemerintah merupakan sebuah hal yang wajar terjadi pada sebuah negara demokrasi, karena dengan adanya peranan kelompok tersebut menunjukkan partisipasi politik yang baik dari warga negara terhadap pemerintah. Tentu sebuah kelompok kepentingan mempunyai tujuan dari partisipasinya pada pemerintah, begitu juga Muslimat pun mempunyai tujuannya dalam implementasi khafidz-khafidzoh Jombang, dimana tujuan atau kepentingan kelompok tersebut, salah satunya untuk meningkat partisipasi kelompoknya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat Jombang.

Kepentingan berikutnya adalah Muslimat ingin meningkatkan kesejahteraan kelompoknya agar semakin menghidupkan kegiatan organisasi. Dalam ikut sertanya Muslimat dalam proses implementasi program dana intensif tentu tidak hanya pengabdian dari kelompok ini yang semakin meningkat, tapi kesejahteraan anggota Muslimat yang mengikuti dalam program ini pun juga meningkat. Dari adanya timbal balik yang baik ini antara sebuah kelompok dengan anggotanya inilah yang menjadikan sebuah ikatan terbentuk, dan berdampak pada meningkatnya partisipasi anggota dalam kegiatan yang diadakan oleh Muslimat Jombang ini.

Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan yang diperoleh anggota Muslimat tentu juga berdampak pada semangat militansi anggota guna menghadapi dinamika politik pada tahun 2018. Dan kepentingan selanjutnya yang diinginkan dalam peranannya dalam implementasi program dana intensif ini, adalah untuk konsolidasi guna menyambut kontestasi politik pada Pilkada 2018, yang memajukan Ketua Muslimat dan juga Wakil Bupati untuk menjadi calon Bupati Jombang.

Idealnya peranan sebuah kelompok kepentingan memang harus seimbang dalam memberikan peranannya kepada kelompok dan lingkungan sosial, karena bila sebuah kelompok kepentingan tidak bisa memberikan peranannya dalam lingkungan maka itu akan berdampak pada legitimasi yang dimiliki kelompok tersebut dari lingkungan sosial. Dan jika

sebuah kelompok kepentingan tidak dapat memperoleh legitimasi dari lingkungan sosial maka kelompok tersebut tidak akan memiliki pengaruh secara politik. Sehingga dari posisi Muslimat saat ini kelompok tersebut harus tetap menjaga peranannya agar tetap mendapat legitimasi politik dari masyarakat Jombang.

Daftar Pustaka

Buku :

Almond, Gabriel. *Comparative Political System*. Southern Political Science Association, 1956.

Almond, Gabriel . *Comparative Politics Today ; A world view*”Interest and Articulation Interes Groups. Stanford University, 2010.

Aspinall, Edward. Sukmajati , Mada. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif, 2014*. Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM, 2015.

Bentley, Arthur F. *The Process of Government, A Study of the Social Pressures*, Chicago, Universty of Chicago Press. 1908.

Rauf Maswadi. *Konsensus dan Konflik Politik* .Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional .2001

Keller, Suzzan. *Penguasa dan Kelompok Elite : Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Tyson, Shaun dan Jackson Tony. *Perilaku Organisasi* . Yogyakarta : Pearson Education Asia, 2001.

Huntington. P Samuel. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang* . Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994.

Sumber lain :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Pendapatan Daerah

Website :

Enggran Eko Budianto, Diusung PDIP-HANURA Perwira Mabes Polri Maju, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d3808946/diusung-pdip-hanura-perwira-mabes-polri-maju-di-pilbup-jombang/>. Diakses pada 10/01/2018 pada jam 20:00.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Kepentingan Muslimat Nahdhatul Ulama Dalam Implementasi Program Dana Intensif
Khafidz-Khafidzoh Jombang**

Jurnal ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui.

Mengetahui

Pembimbing Jurnal

(Ucu Martanto S.IP., M.A.)

NIP. 197903272009121003